



PENETAPAN

31/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI Keadilan
Ketuhanan Yang



Berdasarkan
Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkayang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

JULIAS BIN SANTUA, NIK. 7307032004860004, tempat dan tanggal lahir di Sinjai, 20 April 1986 (38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

NAJEMAH BINTI BALLENG, NIK. 7307036204860001, tempat dan tanggal lahir di Sinjai, 22 April 1986 (38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 3 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2009, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Bolleng karena Ayah Kandung Pemohon II telah Meninggal Dunia karena sakit. Ijab diucapkan langsung oleh Abang Kandung Pemohon II dan Kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing Amin bin Uding dan Sapari bin Said dengan mas kawin sebetulnya cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rifki Anugrah bin Julias, NIK 7307030312100003, lahir di Sinjai pada tanggal 3 Desember 2010;
5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, rumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala ekonomi

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mampu, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

10. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

11. Bahwa, Para Pemohon secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai seorang Petani, dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakkampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karimunting, dengan Nomor 470/27 /Kesos pada tanggal 28 Februari 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Julias bin Santuo**) dengan Pemohon II (**Najemah binti Bolleng**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2019 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 3 April 2024 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa setelah Hakim memeriksa hal terkait identitas, Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa yang hadir saat dilangsungkannya akad nikah Para Pemohon dari pihak Pemohon I adalah: Pemohon I sendirian namun Para Pemohon aalah ekampung di Sinjai sehingga Pemoho II mengetahui betul siapa atau apa status Pemohon I. Sementara dari pihak Pemohon II yang hadir adalah, ibu, kakak kandung laki-laki bernama Jalil Nyang bertindak sebagai wali nikah, paman dan bibi dan banyak dari tetangga.

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 072/Kua.14.06.03/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya pada 1 Maret 2024 .

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Julias** (Pemohon I) NIK. 7307032004860004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Agustus 2020 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Najemah** (Pemohon II) NIK. 7307036204860001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Agustus 2020 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.

B. SAKSI

1.

Safari bin Said, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

b. Bahwa saksi adalah saudara **Kepala Dusun di tempat Para Pemohon bertempat tinggal**.

c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2009 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

d. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Jalil, sebab ayah kandung saksi/Pemohon II bernama Bolleng telah meninggal dunia sebab sakit sebelum akad nikah Para Pemohon dilangsungkan.
- f. Bahwa selain saksi, dari pihak Pemohon II yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon adalah: ibu kandung, kakak kandung laki-laki, paman, bibi, dan banyak dari tetangga. Sementara Pemohon II hadir sendirian.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan keluarga Pemohon II bernama Amin bin Uding.
- h. Bahwa ijab kabul diucapkan oleh Jalil dengan Pemohon I.
- i. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang sementara Pemohon II berstatus gadis;
- k. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah.
- l. Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Rifki Anugrah.
- m. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- n. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon.
- o. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk syarat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

2.

Juanda bin Sappe Lampugu, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Gundul,

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi adalah saudara **tetangga Para Pemohon I** sejak kecil.
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2009 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- d. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon;
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Jalil, sebab ayah kandung saksi/Pemohon II bernama Bolleng telah meninggal dunia sebab sakit sebelum akad nikah Para Pemohon dilangsungkan.
- f. Bahwa selain saksi, dari pihak Pemohon II yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon adalah: ibu kandung, kakak kandung laki-laki, paman, bibi, dan banyak dari tetangga. Sementara Pemohon II hadir sendirian.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan keluarga Pemohon II bernama Amin bin Uding.
- h. Bahwa ijab kabul diucapkan oleh Jalil dengan Pemohon I.
- i. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang sementara Pemohon II berstatus gadis;
- k. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah.

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Rifki Anugrah.

m. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.

n. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon.

o. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk syarat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Asli Surat Keterangan Nomor 072/Kua.14.06.03/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya pada 1 Maret 2024 oleh Para Pemohon karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Para Pemohon memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan *a quo* oleh Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 8 (delapan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yakni KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon di itsbatkan atau disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2009 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2009 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni telah ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang. Selain itu bukti P.1 dan P.2

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun membuktikan bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Julias**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Najemah**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Safari bin Said dan Juanda bin Sappe Lampugu**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo*. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safari bin Said dan saksi Juanda bin Sappe Lampugu, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2009 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.
- b. Bahwa kedua saksi kala itu **menghadiri** prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain kedua saksi, masih ada orang lain yang menyaksikan perkawinan Para Pemohon kala itu, yaitu pihak keluarga inti Pemohon II serta para tetangga.
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Jalil, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Safari bin Said (saksi pertama) dan Amin bin Uding yaitu keluarga Pemohon II.

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum Para Pemohon diakadkan
- f. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- g. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- h. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- j. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.
- k. Bahwa dari perkawinan sirri tersebut, Para Pemohon telah dikarunai 1 anak laki-laki.
- l. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- m. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta untuk kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 308 RBg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Julias** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Najemah**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan Syara' dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2009 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang adalah **sah menurut Hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide.* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan (*vide.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide.* Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai {*vide.* Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam};

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu anak laki-laki yaitu Rifqi Anugrah.
- h.** Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 9 Oktober 2009 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- i.** Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkayang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sehingga Para Pemohon dapat memenuhi syarat kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori: *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa **akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah.** Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **seharusnya setiap perkawinan harus (wajib) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan**

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan** di Kantor Urusan Agama

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 803/KPA-W14-A8/HK.2.6/IV/2024 Tanggal 3 April 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.632040/2024.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Julias bin Santua**) dengan Pemohon II (**Najemah binti Balleng**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2009 di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 015, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Iliyansyah, S.E.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.
Panitera,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP				
	-	Pendaft	:	Rp.	0,00
		aran			
	-	Relaas	:	Rp.	0,00
		Panggil			
		an			
	-	Redaksi	:	Rp.	0,00
2.	Biaya	:	Rp.		0,00
3.	Proses Panggil	:	Rp.		0,00
4.	an Meterai	:	Rp.		0,00
	Jumlah	:	Rp		0,00

(Nol rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)